

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 – 2018

Lukman Qifayat
Program Studi D3 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen
lukkif1997@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten kebumen pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio, data yang digunakan adalah kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah atau instruktif. Rasio efektifitas PAD tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan rasio efisiensi keuangan daerah kabupaten kebumen tergolong efisien. Penggunaan dana masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal. Tingkat Pertumbuhan pendapatan, PAD, belanja operasi, dan belanja modal rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun masih fluktuatif. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah masih tergolong kurang.

Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio derajat desentralisasi fiskal

ABSTRACT

This study aims to determine the ability of financial performance in the district government of Kebumen in 2013 to 2018. The method of this research is quantitative descriptive to measure financial performance with ratios, the data used are quantitative in the form of Budget Realization Reports. Based on the results of the study showed, the level of regional independence is still very low or instructive. The ratio of effectiveness of PAD to the level of effectiveness of regional financial management is quite effective and the ratio of financial efficiency in the district of Kebumen is quite efficient. The use of funds is still not balanced because most of the funds are used for operational expenditure rather than capital expenditure. The level of income growth, PAD, operating expenditure, and capital expenditure on average experienced positive growth but still fluctuating. While the ratio of the degree of fiscal decentralization of local governments is still relatively lacking.

Keywords: Regional financial performance, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio, growth ratio and fiscal decentralization degree ratio.

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu berupa penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengantur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan tepat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 – 2018

kapabilitas dan efektivitas pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai (Rasdalima *et al* 2017:135). Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber utama melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Menurut (Boedi, 2012:185) untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisis ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan daerah (Halim:2007). Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hal ini juga terdapat pada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 pasal 309 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah, yaitu: (1) PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. (3) Lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu sumber PAD di Kabupaten Kebumen adalah pada sektor pariwisata, mengingat pada sektor inilah yang paling potensial yang menghasilkan pendapatan yang sangat besar karena sifatnya yang multisektoral dan *multieffectsn*. Obyek pariwisata di Kebumen dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori yaitu wisata alam dan wisata budaya atau sejarah. Dengan adanya tempat-tempat wisata tersebut, maka potensi pendapatan daerah akan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan daerah, yang disebabkan dari besarnya sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kebumen dari sektor-sektor yang lain. Pengembangan tersebut tentu harus dikelola melalui peningkatan nilai tambah sumber daya yang dikelola secara terpadu dengan memperhatikan aspek pemerintahan yang baik, desentralisasi, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran perbandingan PAD dengan Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen pada tabel sebagai berikut:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 – 2018

Tabel I.1
Realisasi PAD dan Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

TAHUN	PAD	PENDAPATAN TRANSFER	PERSENTASE
2013	131.481.736.502	1.135.499.305.803	11.58%
2014	242.079.502.075	1.233.776.681.950	19.62%
2015	245.159.255.421	1.343.315.952.370	18.25%
2016	291.016.321.703	1.779.771.732.786	16.35%
2017	443.608.862.461	1.712.419.381.173	25.91%
2018	347.309.619.000	1.683.354.032.000	20.63%

Sumber: djpk.kemenkeu (2013-2018)

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi Kabupaten Kebumen antara lain: Pertama, ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah. Kedua rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding dengan pendapatan transfer. Ketiga, kurangnya usaha dan kemampuan pemerintahan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Keempat, inefisiensi pemerintahan daerah dalam melakukan belanja daerah (Pranita 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen selama lima tahun dari tahun 2013-2018 dengan menggunakan Analisa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuanagn Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

TIJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut Halim (2013:01) otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan (Prarono, 2014:88) adalah gambaran neraca/ laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Mahmudi (2016:25).

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retibusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemadirian Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Partisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

Sumber : Thoha (1991) dalam Latuny (2016)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 – 2018

1. Pola Hubungan Instrukturif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
3. Pola Hubungan Partisipatif, yaitu peranan Pemerintah Pusat sudah mula berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan oronomi daerah.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.
Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase %
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75 %

Sumber: Mahmudi (2011) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase Efisiensi	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisiensi
Sama dengan 100	Efisiensi Berimbang
Di bawah 100	Efisiensi

Sumber: Mahmudi (2011) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007:236):

a. Rasio Operasional

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasional yang digunakan pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasional yang digunakan pada tahun ke-0 (tahun sebelumnya n)

6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

$$\text{DDF} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun (t)

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun (t)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 – 2018

Tabel 4

Sekala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Sekala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan keuangan Daerah
00.00-10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-40.00	Sedang
40.01-50.00	baik
> 50.01	Sangat baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data angka hasil analisis dan kemudian ditarik kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Objek penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2013-2018.

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka yang dapat diukur dan dapat dilakukan perhitungan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data yang telah ada dari

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1.

Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	131.481.736.502	1.135.499.305.803	11,58%	Instruktif
2014	242.079.502.075	1.233.776.681.950	19,62%	Instruktif
2015	245.159.255.421	1.343.315.952.370	18,25%	Instruktif
2016	291.016.321.703	1.779.771.732.786	16,35%	Instruktif
2017	443.608.862.461	1.712.419.381.173	25,91%	Instruktif
2018	347.309.619.000	1.683.354.032.000	20,63%	Instruktif

Sumber: djpk.kemenkeu (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada table di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya

dokumen resmi Pemerintahan Kabupaten Kebumen terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2018 yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis data sekunder, yaitu data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2013-2018.

Metode Analisis Data

Metode analisis data, data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah:

- Menyajikan data-data yang sesuai kinerja keuangan
- Menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis laporan keuangan berarti: menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi inti informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat" menurut Pramono (2014:90).

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2013 – 2018

Hal ini disebabkan pendapatan transfer yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan. Berawal pada tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 11,58% kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 19,62%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 18,25%, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 16,35%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 25,91% dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 20,63%

Menurut uraian di atas bahwa Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren masih sangat tinggi, dimana daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

2. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 2.
Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2018

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2013	116.720.489.000	131.481.736.502	112,65	Sangat Efektif
2014	163.586.346.000	242.079.502.075	147,98	Sangat Efektif
2015	221.657.039.000	245.159.255.421	110,60	Sangat Efektif
2016	273.228.579.000	291.016.321.703	106,51	Sangat Efektif
2017	437.343.224.000	443.608.862.461	101,43	Sangat Efektif
2018	364.092.341.000	347.309.619.000	95,39	Cukup Efektif

Sumber:djpk.kemenkeu (diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas PAD Keuangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 sebesar 112.65% mengalami kenaikan tahun 2014 menjadi 147.98%. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 110.60%, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 106.51%. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 101,43% dan tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 95,39%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD tersebut dapat dikatakan bahwa Kinerja

Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2017 sangat efektif, karena nilai prosentase efektivitas yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2018 kriteria efektivitasnya yaitu cukup efektif karena nilai yang diperoleh dibawah 100%. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus tetap mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

3. Rasio Efisiensi keuangan Daerah

Tabel IV.4.
Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2013	1.548.176.706.140	1.626.530.654.021	95,18%	Efisien
2014	1.906.501.957.288	1.967.047.779.137	96,92%	Efisien
2015	2.285.364.998.990	2.326.188.256.641	98,25%	Efisien
2016	2.707.059.847.131	2.606.209.824.034	103,87%	Tidak Efisien
2017	2.630.271.307.685	2.713.113.397.677	96,95%	Efisien
2018	2.812.902.414.000	2.647.019.919.000	106,27%	Tidak Efisien

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun 2013 efisiensi keuangan daerah sebesar 95,18% pada tahun 2014 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan menjadi 96,92%. Tahun 2015 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan menjadi 98,25%, tahun 2016 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan kembali menjadi 103,87%, Tahun

2017 efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan menjadi 96,95% dan ditahun 2018 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan menjadi 106,27%.

Menurut uraian di atas pada tahun 2013,2014,2015 dan 2017 efisiensinya tergolong Efisien karena nilai yang di peroleh dibawah 100% dan total belanja lebih kecil apa bila dibandingkan dengan total

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2013 – 2018

pendapatan. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2018 efisiensinya tergolong tidak efisien disebabkan nilai yang diperoleh lebih dari 100% dan total belanja lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini

masih buruk karena biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar.

4. Rasio Kesorasian

a. Rasio belanja operasional

Tabel IV.5

Penghitungan Rasio Kesorasian Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018 (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Operasional (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)
2013	1.548.176.706.140	1.115.142.005.329	72,03
2014	1.906.501.957.288	1.179.099.679.995	61,85
2015	2.285.364.998.990	1.477.390.569.899	64,65
2016	2.707.059.847.131	1.713.325.387.671	63,29
2017	2.630.271.307.685	1.743.928.710.811	66,30
2018	2.812.902.414.000	1.728.997.326.000	61,47

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2013 rasio belanja operasinya sebesar 72.03% mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 61,88%, kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 64,65%, dan pada tahun 2016 turun

lagi menjadi 63,29%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 66,30% dan pada tahun 2018 turun menjadi 61,47%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 64,93%.

b. Rasio belanja modal

Tabel 6.

Penghitungan Rasio Kesorasian Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018
(Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2013	1.548.176.706.140	433.034.700.811	27,97
2014	1.906.501.957.288	727.402.277.293	38,15
2015	2.285.364.998.990	807.974.429.091	35,35
2016	2.707.059.847.131	993.734.459.460	36,71
2017	2.630.271.307.685	886.342.596.874	33,70
2018	2.812.902.414.000	1.083.905.088.000	38,53

Sumber:djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan tabel di atas Sedangkan pada Rasio Belanja Modal tahun 2013 sebesar 27.97% naik menjadi 38.15% pada tahun 2014, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 35.35%, naik pada tahun 2016 menjadi 36.71%, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 33.70% dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 38.53% sehingga rata-rata rasionya sebesar 35,07%.

untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada standar yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah Kabupaten Kebumen masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kabupaten Kebumen relatif kecil.

Menurut uraian dan perhitungan pada Rasio Kesorasian Belanja Operasi dan Belanja Modal kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018 belum stabil dalam keserasian belanja operasi dan belanja modal. Karena sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kebumen masih diprioritaskan

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2013 – 2018**

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel IV.7.

Penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2018				
Tahun	PAD (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2013	131.481.736.502	1.626.530.654.021	-	-
2014	242.079.502.075	1.967.047.779.137	84,12	20,94
2015	245.159.255,421	2.326.188.256.641	1,27	18,26
2016	291.016.321.703	2.606.209.824.034	18,71	12,04
2017	443.608.862.461	2.713.113.397.677	52,43	4,10
2018	347.309.619.000	2.647.019.919.000	-21,71	-2,44
Rata-rata			26,96	10,58

Sumber:djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2014 sebesar 84,12%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,27%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah turun, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 18,71%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 52,43% menjadi 52,43%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 21,71% menjadi -21,71%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih rendah dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan pada realisasi penerimaan pendapatan tahun 2014 sebesar 20,94%, hal ini disebabkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 18,26%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah mengalami penurunan, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,22% menjadi 12,04%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 7,94% menjadi 4,10%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) pada retribusi daerah mengalami penurunan, - namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 1,66% menjadi (2,44%), hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah turun, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih rendah dibandingkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2013 – 2018

Tabel IV.8

Penghitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2018

Tahun	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2013	1.115.142.005.329	433.034.700.811	-	-
2014	1.179.099.679.995	727.402.277.293	5,74	67,98
2015	1.477.390.569.899	807.974.429.091	25,30	11,08
2016	1.713.325.387.671	993.734.459.460	15,97	22,99
2017	1.743.928.710.811	886.342.596.874	1,79	-10,81
2018	1.728.997.326.000	1.083.905.088.000	-0,86	22,29
Rata-rata			9,59%	22,71%

Sumber: djpk.Kemenkeu(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja operasional tahun 2014 sebesar 5,74%, naik menjadi 24,30% pada tahun 2015. Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 15,97 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 1,79 dan di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi -0,86. Rata-rata yang di peroleh sebesar 9,59%.

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja modal tahun 2014 sebesar 67,98%, kemudian turun menjadi 11,08% pada tahun 2015. Tahun 2016 naik

menjadi 22,99%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi -10,81% dan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 22,29%. Rata-rata yang di peroleh sebesar 22,71%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan baik, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Modal yang selalu mengalami kenaikan meskipun pada kenyataannya proporsi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi

6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel IV.9

Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2018

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2013	131.481.736.502	1.626.530.654.021	8,08	Sangat Kurang
2014	242.079.502.075	1.967.047.779.137	12,31	Kurang
2015	245.159.255.421	2.326.188.256.641	10,54	Kurang
2016	291.016.321.703	2.606.209.824.034	11,17	Kurang
2017	443.608.862.461	2.713.113.397.677	16,35	Kurang
2018	347.309.619.000	2.647.019.919.000	13,12	Kurang

Sumber: djpk.kemenkeu.(diolah)

Menurut uraian dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dari 2013 sampai 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen masih kurang karena masih berada dalam skala interval 10,01% - 20,00%. Pada tahun 2013 sebesar 8,08%, pada tahun 2014 naik menjadi 12,31%, tahun 2015 turun menjadi 10,54%, tahun 2016 naik menjadi 11,17%, tahun 2017 naik menjadi 16,35, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 13,12%.

Hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Sangat Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Kebumen masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam

membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih tergolong sangat rendah dan dalam pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, dengan nilai rasionya rata-rata sebesar 18,72%.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 – 2018

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari rasio efektivitas PAD pada tahun 2013-2017 tergolong sangat efektif, sedangkan tahun 2018 tergolong cukup efektif karena nilai rasio yang diperoleh dibawah 100% yaitu 95,39%.
3. Tingkat efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2013 sebesar 95,18%, 2014 sebesar 96,92%, 2015 sebesar 98,25% dan 2017 sebesar 96,95% tergolong Efisien, sedangkan tahun 2016 sebesar 103,87% dan 2018 sebesar 106,27% tergolong tidak efisien karena nilai yang di peroleh di atas 100%.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih lebih besar mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja Modalnya. Rasio Belanja Operasinya rata-rata rasionya sebesar 64,93% sedangkan Rasio Belanja Modal rata-rata rasionya sebesar 35,07%.
5. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten kebumen rata-rata pertumbuhannya sebesar 26,96% lebih bagus dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 10,58%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal rata-rata pertumbuhannya sebesar 22,71% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi yang sebesar 9,59%.
6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ditahun 2013 dikategorikan sangat kurang karena rasionya 8,08% dan tahun 2014-2018 masih tergolong kurang. Rata-rata rasionya sebesar 11,93% atau masih berada dalam skala interval 10,01-20,00%.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
2. Belanja rutin daerah sebaiknya ditekan dan sebaliknya belanja modal lebih ditingkatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah.
3. Pemerintah lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak lagi diantaranya Rasio Aktivitas, Rasio DSCR, menambah jangka waktu penelitian, dan memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari satu kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.

Latuny, Elsjamina M. 2016. “ Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Study Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)”. *Cita Ekonomi Jurnal Ekonomi* Vol. X No.3.

Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Pramita, R. P. 2015. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Pramono, J., 2014. Analisis Rasio Keuangan Untukmenilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *Among Makarti* 7 (13):83-112.

Rahmawati, N.K.E dan Putra, I.W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*. XV (3). 1767-1795.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

_____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 309 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rasdalima1, R. J., Luntungan, Y. A., Dan W. C. Patrick.2017. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17 (1):134-145.

Soelistijono Boedi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintahan Kabupaten Banjar kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* Volume 2 (2): 183-190.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Yang Kemudian Menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wulandari, Anita. (2001). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No.5).

www.djpk.kemenkeu.go.id